

PERJANJIAN KERJASAMA BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN CHINA DALAM PRESPEKTIF PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR NEGARA

Roby Satya Nugraha¹; Patrisia Maudilia Astri².

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pakuan, Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143

E-mail: robysatyanugraha@unpak.ac.id, patrisia.oktober2015@gmail.com

Naskah diterima : 01/06/2022, revisi : 04/07/2022, disetujui 08/08/2022

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, semakin meningkat pula kerjasama internasional dalam berbagai bentuk perjanjian internasional termasuk dalam pembangunan infrastruktur. Salah satu kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah dengan Pemerintah China. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis, menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan melakukan pengolahan data dengan kualitatif. Adapun masalah yang didapatkan ialah apakah kerjasama bilateral ini membawa dampak baik bagi Indonesia. diperoleh kesimpulan bahwa kerjasama bilateral antara Indonesia dan China dalam pembangunan infrastruktur akan memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian di Indonesia.

Kata Kunci : Bilateral, Infrastruktur.

ABSTRACT

The purpose of this research is to explain the development of the world which is marked by the rapid progress of science and technology which has increased the intensity of relations and interdependence between countries. In line with the increase in these relations, international cooperation is also increasing in various forms of international agreements including in infrastructure development. One of the international cooperation carried out by the Government of the Republic of Indonesia is with the Government of China. This type of research is normative research which is descriptive analytical, using secondary data with data collection techniques through library research and conducting qualitative data processing. The problem encountered is whether this bilateral cooperation has a good impact on Indonesia. it was concluded that bilateral cooperation between Indonesia and China in infrastructure development will have a positive impact on improving the economy in Indonesia.

Keywords: Bilateral, Infrastructure.



A. Pendahuluan

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antar negara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, semakin meningkat pula kerjasama internasional dalam berbagai bentuk perjanjian internasional termasuk dalam pembangunan infrastruktur. Keterlibatan Indonesia dalam kerjasama internasional merupakan perwujudan tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah dengan Pemerintah China.

Hubungan antara Indonesia dan China telah terjalin secara diplomatik lebih dari 60 tahun, dalam beberapa sumber dikatakan bahwa hubungan ini terjalin tidak lepas dari kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dalam memandang konstelasi politik internasional pada masa perang dingin.¹ Dalam perjalanannya, hubungan antara Indonesia dan Tiongkok sangat dinamis. Pasca terjadi peristiwa G30S PKI di Indonesia pada tahun 1965 dan dimulainya era Orde Baru, Pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto membekukan hubungan diplomatik dengan Tiongkok, karena adanya informasi yang menyatakan bahwa Tiongkok mendukung upaya Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam upaya revolusi yang mengakibatkan banyak Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) meninggal karena penculikan dan pembunuhan.²

Pasca reformasi di tahun 1998 dan terpilihnya K.H. Abdurahman Wahid (Gus Dur) menjadi Presiden Indonesia keempat membawa perubahan hubungan Indonesia-China. Dengan adanya normalisasi hubungan diplomatik antara kedua negara, hingga dilanjutkan oleh kebijakan Presiden Megawati yang menjadikan tahun baru Imlek atau tahun baru Tiongkok sebagai hari libur nasional semakin memberi tanda bahwa hubungan Indonesia dan China telah harmonis kembali serta menjadi awal baru kerjasama yang lebih erat antara kedua negara ini.

Semakin membaiknya hubungan antara Indonesia dan China di era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono ditandai dengan perjanjian kemitraan strategis antara kedua negara pada tahun 2004 dan kemudian ditingkatkan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada tahun 2013, serta kerjasama yang cakupannya lebih besar dalam kerangka perdagangan bebas antara ASEAN dan Tiongkok yang biasa dikenal sebagai *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA).³

¹ Rini Utami, "Hubungan Indonesia-Tiongkok: dari Soekarno hingga Jokowi", <https://www.antaranews.com>., diakses tanggal 10 Oktober 2020.

² Dani Hamdani, "Membuka Tabir: China dalam Pusaran G30SPKI", <https://www.gatra.com>., diakses tanggal 10 Oktober 2020.

³ Lidya Christin Sinaga, *Enam Dekade Hubungan Diplomatik Indonesia - China dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Keamanan dan Ekonomi di Asia Tenggara*, (Jakarta: LIPI Press, 2013), hlm. 2-7.

Sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014, Joko Widodo mempersiapkan pembangunan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Hal tersebut termasuk ke dalam Nawacita yang digaungkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kerjasama tersebut diawali oleh sikap Presiden Joko Widodo pada awal pemerintahannya di akhir 2014, langsung menjalin kedekatan dengan berbagai negara. Ini terlihat pada pertemuan bilateral di beberapa agenda internasional dan kunjungan langsung kenegaraan. Dari banyak negara tersebut, kedekatan yang cukup terlihat adalah dengan pemerintahan China, di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping. Keeratan hubungan ini terlihat ketika kehadiran Presiden Joko Widodo dalam agenda APEC di Beijing. Presiden Joko Widodo mendapatkan panggung untuk memperkenalkan Indonesia dari segala sisi. Sebulan kemudian, Presiden Xi Jinping juga datang ke Indonesia untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Ini sekaligus dalam rangka menghadiri pegelaran Konferensi Asia Afrika (KAA) di Indonesia. Termasuk mengikuti ritual berjalan kaki di depan Gedung Merdeka, Bandung. Kedekatan ini makin terasa jelas, ketika para menteri langsung menindaklanjuti pertemuan antar pimpinan negara di kemudian hari, diantaranya Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang S. Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno yang menandatangani berbagai kesepakatan.⁴

Meningkatkan kerjasama dengan China saat ini merupakan kebijakan yang sangat logis, menurut *International Monetary Fund* (IMF) dengan mengacu pada indikator *Purchasing Power Parity* (PPP) China telah menjadi kekuatan ekonomi terbesar dunia, menggeser hegemoni Amerika Serikat (AS) sejak Perang Dunia II, pada tahun 2014 *Gross Domestic Product* (GDP) China telah mencapai US\$ 18.976 milyar, berada di peringkat pertama dunia, sementara AS tergusur di posisi kedua dengan total GDP sebesar US\$ 18.125 milyar, ini pertama kalinya dalam sejarah ekonomi dunia modern, Tiongkok melampaui kekuatan ekonomi Amerika Serikat.⁵

Era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia mulai mengejar ketertinggalan pembangunan khususnya di sektor infrastruktur. Alasan logis kenapa Presiden Joko Widodo memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai alat utama pertumbuhan ekonomi adalah sejalan dengan penelitian Demurger, seorang profesor ekonomi pembangunan dari Universitas Auvergne Perancis di tahun 2000, yang menyatakan bahwa infrastruktur adalah faktor utama sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.⁶

Kerjasama infrastruktur antara Indonesia China telah dimulai sejak tahun 2002, diawali dengan penandatanganan *memorandum of understanding* (MoU) antara Kementerian Komunikasi China dengan Kementerian PUPR. MoU ini mengenai kerja sama ekonomi dan teknis pada bidang jembatan, jalan dan proyek infrastruktur di Beijing.⁷ Hubungan bilateral Indonesia dan China terlihat semakin erat di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terutama dalam hal kerja sama investasi, perdagangan, dan pariwisata. Padahal di sisi lain,

⁴ Maikel Jefriando, "Era Jokowi, Indonesia-Cina Makin Mesra", <https://finance.detik.com>., diakses tanggal 10 Oktober 2020.

⁵ Umar Suyadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 246.

⁶ Sigit Setiawan, "Asean-China FTA: Dampaknya terhadap Ekspor Indonesia dan Cina", *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 6, No. 2 Desember 2012, hlm. 18.

⁷ Dani Prabowo, "Lagi, China Terlibat Proyek Infrastruktur Indonesia", <https://properti.kompas.com>., diakses tanggal 10 Oktober 2020.

banyak pihak mengkhawatirkan ekspansi ekonomi China bisa membuat negara lain terjerumus dalam jerat utang. Di awal kepemimpinan Jokowi pada 2015, nilai perdagangan China-Indonesia meningkat menjadi US\$48,2 miliar jika dibandingkan pada 2005 yang hanya mencapai US\$8,7 miliar. Di era Jokowi, pemerintah menggandeng China untuk berinvestasi di sejumlah proyek infrastruktur besar negara, antara lain proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, bendungan Pelosika di Sulawesi Tenggara.⁸ Pemerintah China memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur Indonesia, baik di bidang sumber daya air maupun jalan tol. Contoh terbesar di bidang sumber daya air adalah Bendungan Jatigede. Pemerintah Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Pemerintah China pada pembangunan tiga bendungan lainnya, yaitu bendungan Jenelata di Sulawesi Selatan, bendungan Riam Kiwa di Kalimantan Selatan dan Bendungan Lambakan di Kalimantan Timur.⁹

Membangun pemahaman masyarakat Indonesia pada kerjasama bilateral Indonesia-China diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan kerja sama kedua negara untuk bersama-sama pulih secara ekonomi dari pandemi Covid-19 yang dialami dunia. Dalam tiga tahun terakhir, investasi China di Indonesia mengalami peningkatan khususnya pada sektor industri logam, industri listrik, dan pembangunan infrastruktur publik. Ekspor produk industri logam juga tetap meningkat meskipun pada masa pandemi. Hal ini sangat membantu ekonomi Indonesia yang tengah terdampak oleh Covid-19.¹⁰

Di sisi lain, investasi ini juga turut memicu polemik dengan rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) China untuk pembangunan *smelter* di Kawasan Industri Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara. Dalam tiga tahun terakhir peningkatan investasi China di Indonesia sebagian besar berada pada sektor industri logam, industri listrik dan pembangunan infrastruktur publik, maka dapat dipahami bahwa manajemen dan tim pakar serta teknisi dari China diperlukan untuk penyelesaian pembangunan proyek tersebut. Selain itu, penggunaan tenaga kerja asing dapat diperkenankan, namun perlu dipastikan bahwa investasi tersebut dapat menciptakan lapangan kerja lokal, mengaplikasikan transfer teknologi, membawa manfaat bagi warga lokal, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis, menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang sesuai dengan judul penelitian artikel ini dan melakukan pengolahan data dengan kualitatif.

⁸ CNN Indonesia, "Relasi Indonesia-China di Era Jokowi: Mau tapi Malu", <https://www.cnnindonesia.com>., diakses tanggal 10 Oktober 2020.

⁹ Dani Prabowo, *Loc. Cit.*

¹⁰ Iwan Supriyatna, "Kerjasama Bilateral Indonesia-China Penting Dipahami Masyarakat", <https://www.suara.com>., diakses tanggal 10 Oktober 2020.

C. Hasil dan Pembahasan

Analisis terhadap Pengaturan dan Pelaksanaan Kerjasama Bilateral Antara Indonesia dan China dalam Pembangunan Infrastruktur

Pada masa kepemimpinan Deng Xioping, China mulai mengadopsi kebijakan yang pragmatis dengan menjadikan ekonomi domestik sebagai fokus utama politik luar negerinya melalui penerapan *open door policy*. China membangun perekonomiannya melalui perdagangan, bantuan luar negeri, serta *Foreign Direct Investment* (FDI). Kondisi ini memantapkan China untuk semakin meluaskan pasar dalam pasar global, melalui penggabungan dengan WTO, World Bank, The Asian Development Bank, dan APEC. Transformasi ekonomi dan integrasi China dalam pasar global menjadi salah satu perkembangan ekonomi dunia yang sangat dramatis. Pertumbuhan produk domestik China rata-rata hampir mencapai angka delapan persen dan membuat China menempati peringkat enam besar ekonomi dunia di tahun 1990-an.¹¹ Semenjak melakukan reformasi ekonomi, pertumbuhan perekonomian China meningkat pesat. Pertumbuhan ekonomi tersebut menjadikan China memiliki *power* yang kuat di dunia internasional. China menggunakan ekspor sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi. Perekonomian China juga sangat bergantung pada kondisi ekonomi global, dimana perubahan ekonomi dan politik global akan mempengaruhi kebijakan ekonomi politik China.

Perpolitikan internal China diwarnai dengan prinsip-prinsip pokok yang didengungkan oleh kepemimpinan Partai Komunis China. China sering mengalami guncangan bagi stabilitas politik yang ditandai dengan kekacauan pada tingkat sosial masyarakat karena ketidaksiapan masyarakat akan reformasi politik. Reformasi oleh karenanya harus dilakukan secara bertahap dan tetap berkarakteristikan China. Stabilitas rezim perpolitikan China dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepemimpinan, perubahan ekonomi, revolusi informasi, dan lingkungan eksternal. Selain itu, stabilitas juga didukung dengan baik oleh militer, baik dari kalangan Komisi Militer Pusat, maupun dari tokoh-tokoh Tentara Pembebasan Rakyat, dan dengan model politik elitis.¹²

China melaksanakan politik luar negeri yang independen atas dasar prinsip hidup berdampingan, sesuai dengan kebijakan *peacefull coexistence*. Prinsip-prinsip tersebut meliputi menghormati kedaulatan negara lain, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, semua negara memiliki derajat yang sama dan saling menghormati dalam hubungan internasional, penyelesaian sengketa dalam hubungan internasional melalui konsultasi secara bersahabat, dan tidak melakukan agresi terhadap negara lain. Dalam menunjukkan legitimasi dan prestise, pemerintah dan Partai Komunis China menggunakan *foreign affair* sebagai landasan kebijakan luar negeri untuk tiap-tiap isu, seperti ekonomi, politik, militer dan sosial.¹³

Adapun kebijakan ekonomi politik yang dijalankan oleh China dalam merealisasikan pencapaian kepentingan nasionalnya, yaitu dalam meningkatkan pengaruh perekonomiannya, terutama pada dunia internasional antara lain menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain, menanamkan modal investasi di negara lain dan membangun hubungan kerjasama dengan

¹¹ Muhammad Riduan, *Kebijakan Ekonomi Politik Cina Dalam Pembangunan di Indonesia*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017), hlm. 74.

¹² *Ibid.*, hlm. 75.

¹³ *Ibid.*



organisasi internasional, terutama organisasi perdagangan internasional seperti WTO. Kebijakan ekonomi politik tersebut merupakan konsep *soft power* yang digunakan China untuk membangun sebuah kemitraan ekonomi. Oleh karenanya, muncul sebuah pemahaman bahwa yang menjadi fokus China dalam pemcapaian kepentingan nasionalnya adalah dengan membangun dan mengembangkan *soft power*-nya.

Pertama, menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain. Sejak diberlakukannya kebijakan *open door policy* merupakan salah satu tonggak awal keterbukaan China untuk membangun hubungan kerjasama dengan negara lain. Bentuk nyata dari kesadaran China akan pentingnya menjalin hubungan baik dengan negara lain, diwujudkan dengan konsep *peaceful development* yang pertama kali dicetuskan oleh Presiden Hu Jintao pada tahun 2014. Melalui konsep ini, China ingin menyampaikan bahwa kebangkitan China tidak akan merugikan, tidak akan menghalangi, dan tidak menimbulkan ancaman terhadap negara lain.¹⁴

Hal terpenting dari prinsip tersebut adalah bahwa keinginan China untuk membentuk lingkungan yang kondusif bagi perkembangan perekonomian domestik China. Dengan harapan, kondisi yang damai dapat membantu meningkatkan kemakmuran, mempermudah perusahaan-perusahaan China untuk mencari sumber daya dari luar, dan memungkinkan sumber daya tersebut masuk dan keluar dengan leluasa. Dengan demikian, kerjasama yang terbangun dapat membantu China untuk memenuhi kepentingan-kepentingan terkait pertumbuhan ekonominya.

Kedua, menanamkan modal investasi di negara lain. Sebagai salah satu negara terbesar di Asia Pasifik, dan terluas ke empat di dunia, China memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan perekonomiannya, bahkan perekonomian China dapat dilihat sebagai sebuah kekuatan ekonomi dengan skala satu benua bukan pada skala satu negara.

Ketiga, membangun hubungan kerjasama dengan organisasi internasional. Salah satu cara yang dilakukan China dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah menjadikan perdagangan internasional sebagai sumber penting dalam pertumbuhan ekonomi. China menjadikan ekspor sebagai sumber utama dalam ekonomi negara. Oleh karena itu, China lebih memilih menjalin hubungan dengan organisasi perdagangan internasional. Selain melakukan hubungan kerjasama WTO, guna mewujudkan tedariknya memperkuat perekonomian, China telah lama membangun relasi hubungan kerjasama dengan organisasi kawasan ASEAN sejak tahun 1990-an, karena China menganggap bahwa ASEAN merupakan suatu komunitas yang menjanjikan dibidang perekonomian. China berusaha keras untuk melebarkan sayap perekonomiannya, salah satu usahanya adalah dengan memproduksi barang-barang langsung dari negaranya, dan hasil kerja keras tersebut dapat dilihat dari bagaimana ketergantungan pasar dunia terhadap produk-produk China yang dapat bersaing dengan negara-negara lain, dan banyak diminati oleh berbagai negara di belahan dunia, termasuk negara-negara kawasan ASEAN. Dengan melakukan kerjasama organisasi internasional, merupakan salah satu strategi China untuk untuk memperluas pengaruh perekonomiannya di dunia internasional.

Pembangunan Infrastruktur merupakan salah satu langkah yang dapat menunjang peningkatan pembangunan perekonomian terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja, dalam

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 76.

upaya peningkatan investasi dalam hal pengembangan infrastruktur publik, maka akan mampu memberikan kesejahteraan penduduk melalui pembangunan ekonomi suatu negara. Peran pemerintah sebagai institusi negara sangat dibutuhkan menyangkut tanggung jawab dalam penyediaan dan pengembangan infrastruktur sebagai sarana distribusi logistik perekonomian.

Salah satu sarana dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur adalah melalui investasi dibidang infrastruktur tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Catherine J. Amy Ellen Schwartz dan Morrison. Mereka mengatakan terdapat manfaat positif dari meningkatnya investasi pada infrastruktur untuk jangka panjang yang mencakup wilayah tertentu. Selain itu dijelaskan pula bahwa investasi dalam infrastruktur publik merupakan contoh penting dari sebuah properti yang bisa menghasilkan dampak ekonomi. Jika belanja modal publik memiliki dampak positif, sehingga produksi dan penghematan biaya bagi perusahaan yang sedang mengalami kesulitan ekonomi berdampak pada keputusan politik tentang investasi di bidang infrastruktur dapat menjadi besar.¹⁵

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan dengan kondisi geografis yang bermacam-macam. Oleh karena itu, untuk pendistribusian perekonomian diperlukan akses infrastruktur yang memadai baik darat, laut maupun udara, sebagai sarana penunjang perekonomian pada wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Penyediaan infrastruktur di Indonesia cenderung berjalan lambat hal ini dikarenakan adanya berbagai kendala yang dihadapi dari berbagai tahapan proyek, mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap implementasi, terutama yang menyangkut masalah-masalah anggaran pendanaan. Secara keseluruhan, lemahnya koordinasi antara pemangku kepentingan juga sering kali mengakibatkan mundurnya pengambilan keputusan sebagai langkah eksekusi dalam rencana pembangunan infrastruktur.

Program pembangunan infrastruktur menjadi prioritas sebagai tulang punggung penggerak ekonomi termasuk melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada tahun 2005 dimasa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Beberapa ikon pembangunan pemerintahan presiden SBY pada masa itu, yaitu Jalan Nasional Lintas Selatan Jawa Timur, Jalan Trans Kalimantan, Tol Bali Mandara, Jembatan Suramadu dan Jembatan Kelok Sembilan. Di bagian lain, SBY juga berhasil membangun setidaknya 20 waduk baru, 412 Embung, dan jaringan irigasi seluas 1,3 juta hektar.¹⁶

Program pembangunan terus berlanjut, hingga peralihan masa kepemimpinan pada tahun 2014, Presiden Jokowi mencanangkan NAWA CITA dengan memperkuat konektivitas nasional untuk keseimbangan pembangunan, penyediaan infrastruktur dasar, ketahanan air, pangan dan energi, dan transportasi massal perkotaan secara terintegrasi melalui kerjasama pemerintah, swasta maupun kerjasama internasional. Pembangunan yang dijalankan di Indonesia selalu mengalami berbagai macam kendala, terutama masalah pendanaan karena ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan anggaran untuk memenuhi rencana pembangunan, sehingga Indonesia selalu

¹⁵ Gunadi Siswo Pamungkas, "Pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar Kota Surabaya", <http://www.lib.ui.ac.id/file?file=digital/132995-T%2027821...HA.pdf>, diakses tanggal 10 Desember 2020.

¹⁶ Sardan Marbun., "Satu Dasawarsa Membangun untuk Kesejahteraan Rakyat", <http://www.academia.edu/>, diakses tanggal 10 Desember 2020.



berpatokan kepada pertumbuhan ekonomi dalam realisasinya dengan bantuan modal asing yang diasumsikan dapat membantu perekonomian negara.

Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa proses pembangunan infrastruktur di Indonesia, tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya sokongan dana dari pihak-pihak swasta maupun asing, baik berupa bantuan maupun dalam bentuk investasi guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dengan demikian, Indonesia dituntut untuk lebih gencar dalam menjaling hubungan kerjasama guna mendorong minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan China sudah dimulai dari bergulirnya masa orde lama pada kepemimpinan Presiden Soekarno, hingga masa Orde Baru, dan terus berlanjut sampai pada reformasi saat ini. Hubungan kedua negara ini mengalami berbagai macam dinamika, yang dipengaruhi oleh kondisi perpolitikannya masing-masing. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan China sempat terputus pada masa Orde Baru akibat kian memanasnya perpolitikan di Indonesia, karena kian gencarnya pemerintah dalam memberantas Partai Komunis Indonesia (PKI) yang merupakan ideologi yang dianut oleh China.

Sebagai wujud keharmonisan hubungan bilateral kedua negara, Indonesia dan China sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman atau MoU pada tanggal 25 April 2005. Dengan ditandatanganinya *Strategic Partnership Agreement* antara Indonesia-China pada tanggal 25 April 2005, saat Presiden Hu Jin Tao berkunjung ke Indonesia. Kemitraan strategis ini akan difokuskan untuk memperkuat kerjasama politik dan keamanan, memperdalam kerjasama ekonomi dan pembangunan, meningkatkan kerjasama sosial budaya, dan memperluas hubungan nonpemerintah. Ada tiga bidang luas yang dicakup dalam perjanjian kemitraan strategis ini, yaitu kerjasama politik dan keamanan, kerjasama ekonomi dan pembangunan dan kerjasama sosial budaya.¹⁷

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, peningkatan hubungan Indonesia-China juga dapat dilihat dalam momen perayaan 65 tahun hubungan bilateral kedua negara. Pada perayaan 65 tahun hubungan Bilateral Indonesia-China, Jokowi melakukan kunjungan kembali ke China pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015. Lebih dari kunjungannya yang pertama, Jokowi dan Presiden China Xi Jinping membahas beberapa hal untuk meningkatkan hubungan kerjasama Indonesia dan China. Dua kepala negara memfokuskan pembicaraannya pada bidang ekonomi khususnya sektor perdagangan, keuangan, infrastruktur, perindustrian, pariwisata, hingga hubungan antara masyarakat. Sebagai hasil dari kunjungan kedua ini, Indonesia dan China berhasil menyepakati delapan MoU.

Sejak dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2014, hingga saat ini Indonesia sudah memiliki 36 MoU dengan China. 36 kesepakatan Indonesia-China tersebut mencakup antara lain dalam bidang perekonomian, budaya, pendidikan, dan pariwisata. Hubungan kerjasama tersebut, sebagaimana tercatat oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia, terdapat 36 MoU baru Indonesia-

¹⁷ Zainuddin Djafar, *Op. Cit.*, hlm. 58.

China di era Jokowi. Disepakatinya 36 MoU Indonesia-China dalam waktu yang cukup singkat, menandakan keseriusan Indonesia dan China untuk menjalin hubungan yang lebih dekat.¹⁸

Indonesia sendiri memiliki perhatian khusus yang dipandang oleh China untuk melakukan interaksi-interaksi yang berkaitan dengan perbincangan dalam membahas masalah ekonomi kedua negara secara lebih dekat dan bersahabat. Selain itu, mengapa China merupakan negara yang strategis untuk menjalankan hubungan kerjasama, dikarenakan China tergolong kedalam negara dengan sumber kekuatan dunia yang baru selain negara-negara yang ada di belahan Eropa. Selain itu juga, posisi China yang berada di kawasan Asia memberikan dampak positif bagi kawasan sekitarnya untuk dapat menjalin kerjasama regional, karena China dianggap sebagai negara penentu yang memiliki pengaruh cukup besar bagi pergerakan pembangunan infrastruktur dunia, khususnya dalam bidang perekonomian.

Kebijakan ekonomi politik yang menjadi tonggak kemajuan perekonomian China yakni penerapan kebijakan pintu terbuka (*open door policy*) yang merupakan komponen dari empat pilar, yaitu rekonstruksi bidang pertanian, industri dan teknologi, pendidikan serta pertahanan. Dengan keterbukaan China terhadap dunia internasional, sehingga membentuk kekuatan baru bagi China sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Dengan kemajuan perekonomian yang begitu pesat melalui kebijakan ekonomi politiknya, membuat negara-negara berkembang tertarik untuk menjalin hubungan kerjasama dengan China sambil menarik investor China untuk berinvestasi di negaranya, hal ini tak terkecuali bagi Indonesia.

Untuk memajukan perekonomiannya, China menerapkan sistem ekonomi kapitalis, sedangkan untuk politik menggunakan sistem otoriter. Dengan mereformasi perekonomian pada sistem kapitalis yang ditandai dengan keterbukaan China terhadap masuknya investor asing, terlebih keikutsetraan China dalam organisasi perdagangan bebas, tidak terlalu berpengaruh terhadap kebijakan dengan sistem politik otoriter, karena China menganggap walaupun saling berhubungan antara sistem ekonomi dan sistem politik akan tetapi dalam implementasinya dapat dijalankan secara terpisah. Hal tersebut memberikan keunikan tersendiri, perbedaan sistem yang diterapkan antara politik dan ekonomi, namun China membuktikan hal tersebut bukan suatu hambatan dalam mencapai suatu kemajuan. Pencapaian yang telah dilakukan oleh China tidaklah sepenuhnya tanpa kendala, akan tetapi karena penerapan strategi dan pendekatan (*soft power*) yang dilakukan menyebabkan negara ini cepat beradaptasi dengan persaingan.¹⁹

Langkah konkrit strategi pembangunan ekonomi Indonesia lebih berorientasi pada pembangunan infrastruktur. Adanya infrastruktur yang kuat akan meningkatkan *capital in flow* yang masuk dengan keras, yang selanjutnya akan bisa digunakan untuk memenuhi sektor-sektor yang dapat dijadikan sebagai fondasi untuk perekonomian bangsa, yang pada akhirnya akan melahirkan Indonesia yang mandiri, yaitu dengan berbasis pada perekonomian domestik, dan penanaman investor asing yang merupakan dampak dari baiknya infrastruktur yang baik pula.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 165.

¹⁹ Harfi Hambani, "Colaboration Of Cooperate Strategy Economic Tiongkok And Indonesia: Sebagai Power Plan Economic Country Indonesia", *Jurnal. Universitas Mataram*, 2015, hlm. 46.

Salah satu masalah yang dihadapi Indonesia dalam rencana pembenahan Infrastruktur adalah mengenai pembiayaan, hal ini dikarenakan ketersediaan anggaran yang kurang memadai.

Untuk mengatasi permasalahan anggaran pembangunan infrastruktur, Indonesia melakukan langkah kerjasama internasional sebagai solusi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kerjasama kemitraan strategis yang disepakati oleh Indonesia dan China merupakan tatanan dalam sebuah dinamika hubungan internasional.

Hubungan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan China merupakan sebuah pola interaksi dalam lingkup hubungan internasional. Pola interaksi tersebut timbul dikarenakan kesadaran suatu negara akan kemampuannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakatnya serta berbagai macam dinamika persoalan-persoalan domestik secara mandiri, baik dari segi ekonomi, politik, maupun dalam hal kelangsungan pembangunan dalam negara tersebut. Untuk menjalin sebuah kerjasama tidak terlepas dari peran aktor-aktor yang terlibat dalam pemerintahan masing-masing negara, sebagai jembatan penghubung untuk merealisasikan tujuan serta kepentingan negara.

Seperti yang dipercayai oleh ajaran tradisional bahwa hubungan internasional merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh negara, sehingga membentuk pola-pola dari aksi dan reaksi diantara negara-negara yang berdaulat. Dalam hal ini, yang diwakili oleh aktor-aktor politik masing-masing negara. Hal tersebut juga diperkuat oleh Hans J. Morgenthau yang mengatakan bahwa tingkah laku suatu bangsa atau negara akan tercermin pada tindakan-tindakan para diplomat dan pemimpin militernya yang selalu berjuang untuk mempertahankan atau memperbanyak keuntungan-keuntungan politik demi kemajuan atau kelangsungan hidup negara mereka.²⁰ Dikarenakan peran perwakilan negara sebagai aktor politik, sehingga kerjasama kemitraan strategis antara Indonesia dan China dapat disepakati dan ditandatangani oleh kedua negara.

Pada masa pandemi Covid-19, China menawarkan berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui Kedutaan Besar RI di Beijing. Duta Besar Republik Indonesia untuk China mengatakan bahwa pihaknya telah bertemu Wakil Presiden China Gezhouba Group International Engineering Co Ltd, Hu Peng. Gezhouba merupakan BUMN China yang telah mengerjakan 12 proyek pembangunan di Indonesia sejak tahun 2006, termasuk pembangkit listrik di Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat.²¹

Dampak Kerjasama Bilateral Antara Indonesia dan China Dalam Pembangunan Infrastruktur

Pentingnya hubungan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan China merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor politik dalam hal ini peran pemerintah yang berperan penting dalam peningkatan sektor perekonomian di Indonesia. Dengan dibukanya hubungan kerjasama tersebut memberikan dampak besar dalam mengatasi masalah-masalah pembangunan infrastruktur Indonesia. Mengingat keterbatasan kemampuan Indonesia dalam melakukan percepatan pembangunan, maka dari itu sudah menjadi keharusan bagi Indonesia untuk

²⁰ Muhammad Riduan, *Op. Cit.*, hlm. 83.

²¹ M. Irfan Ilmie, "China Tawarkan Proyek Infrastruktur di Indonesia di Tengah Pandemi", <https://www.antaranews.com>., diakses tanggal 10 Nopember 2020.

bisa menjalin hubungan kerjasama internasional, sebagai bentuk interaksi yang di lakukan oleh negara-negara dalam lingkup dunia internasional.

Kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia, ikut mendorong terselenggaranya sebuah kerjasama internasional. Dalam hal ini pemerintah banyak melakukan diplomasi dengan negara-negara kawasan global, salah satunya dengan melakukan kerjasama bilateral maupun multilateral guna terselenggaranya tujuan kepentingan nasional. seperti halnya kerjasama kemitraan strategis yang disepakati oleh Indonesia dan China merupakan wujud untuk merealisasikan tujuan kepentingan nasional dalam meningkatkan pembangunan dan perekonomian di Indonesia.

Dengan meningkatnya kerjasama bilateral antara Indonesia dalam pembangunan infrastruktur, semakin meyakinkan hubungan bilateral kedua negara dapat dijalankan kerjasama disektor dengan lebih luas lagi. Dengan terselenggaranya hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan China, sudah tentu berdampak positif bagi kedua negara, terutama bagi Indonesia. Adapun dampak kerjasama bilateral antara Indonesia dan China dalam pembangunan infrastruktur, antara lain:

1. Meningkatkan investor asing yang masuk ke Indonesia

Kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dan China, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur, memberikan keuntungan besar bagi Indonesia, karena dengan kondisi infrastruktur yang baik dan memadai, maka akan mampu membangun kepercayaan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan pasokan dana yang cukup besar, sebagai langkah guna melaksanakan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus berusaha untuk menggali sumber pendanaan dari masuknya investasi asing di Indonesia, dengan terus melakukan pembenahan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.

Kerjasama yang dilakukan antar negara dapat menjadi suatu cara dalam menarik investor untuk menanamkan modalnya di negara tersebut, sementara banyaknya investor yang mau menginvestasikan modalnya dapat menjadi peluang bagi negara tersebut untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan negara tersebut. Selain itu, banyaknya investasi dapat pula menambah dan menciptakan lapangan pekerjaan baru, sehingga dapat menanggulangi tingkat pengangguran. Begitu juga kerjasama yang diselenggarakan oleh Indonesia dan China. Indonesia mampu menarik investor asing tak terkecuali yang berasal dari China untuk menanamkan investasi di berbagai sektor.

Dalam konteks ini, semakin harmonisnya hubungan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan China, akan memberikan keuntungan besar bagi Indonesia. Dengan kerjasama yang telah dibangun akan menimbulkan kepercayaan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, tak terkecuali bagi investor China itu sendiri, untuk lebih aktif menanamkan modalnya di Indonesia.

2. Memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah mengenai kemiskinan. Hal ini dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat untuk bekerja, sehingga masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Oleh

karena itu, pemerintah diharapkan dapat mengatasi masalah ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, Indonesia harus bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, karena boleh dikatakan bahwa apabila perekonomian baik, maka pemenuhan kebutuhan masyarakat akan mudah untuk ditanggulangi. Oleh karena itu, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk menyerap pengangguran yang telah ada dan menurunkan angka pengangguran tersebut. Salah satu jalannya adalah dengan meningkatkan iklim investasi dan memperbaiki daya saing Indonesia di pasar internasional.

Peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang terus diberikan oleh sektor konstruksi pada pertumbuhan produk domestik nasional menggambarkan bahwa sektor konstruksi mampu menjadi sektor unggul yang mampu menjadi motor bagi kemajuan sektor-sektor lain. Selain kontribusinya yang terus meningkat, sektor konstruksi juga merupakan sektor ekonomi yang berkontribusi cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja nasional karena sektor konstruksi merupakan sektor padat karya yang membutuhkan banyak tenaga kerja.

3. Meningkatnya perekonomian di Indonesia

Hubungan kerjasama Indonesia dan China yang tertuang dalam kerjasama kemitraan strategis. Sudah jelas bertujuan untuk meningkatkan kondisi perekonomian bagi kedua negara. Tidak terkecuali bagi negara Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, keuntungan yang di peroleh dari kerjasama bilateral dalam hal pembangunan infrastruktur tersebut yakni dapat memajukan lalu lintas ekspor dan impor kedua negara dengan lebih mudah.

Dengan pembenahan dibidang infrastruktur akan berkontribusi dalam peningkatan produktifitas dan diharapkan mampu mendukung perekonomian dalam jangka panjang. Infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi karena akan mempermudah akses perdagangan.

Indonesia menjadikan China sebagai negara tujuan ekspor, dari hasil sumber daya alamnya. Seperti yang diketahui bahwa setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat di negaranya. Sehingga tidak heran bila setiap negara cenderung ingin mengadakan kerjasama dengan negara lain. China banyak memproduksi barang-barang teknologi yang canggih, namun China tidak memiliki sumberdaya alam yang melimpah seperti Indonesia. Begitu pula Indonesia yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah namun tidak memiliki teknologi canggih untuk mengolahnya. Itulah yang menjadi alasan mengapa Indonesia banyak melakukan ekspor hasil sumber daya alam ke negara China.

Oleh karena itu, kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan China memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian di Indonesia. Sudah sewajarnya kerjasama tersebut dapat ditingkatkan guna menjalin hubungan kerjasama yang lebih kompleks guna kemajuan perekonomian kedua negara.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Pengaturan dan pelaksanaan kerjasama bilateral antara Indonesia dan China dalam pembangunan infrastruktur dimulai sejak tahun 2002 yang diawali dengan penandatanganan



memorandum of understanding (MoU) antara Kementerian Komunikasi China dengan Kementerian PUPR. Sampai dengan tahun 2019, Indonesia sudah memiliki 36 MoU dengan China. Sampai dengan tahun 2020 kerjasama bilateral antara Indonesia dan China dalam pembangunan infrastruktur memasuki usia 70 tahun. Hal tersebut menandakan keseriusan Indonesia dan China untuk menjalin hubungan yang lebih dekat. Dampak kerjasama bilateral antara Indonesia dan China dalam pembangunan infrastruktur, yaitu meningkatnya investor asing yang masuk ke Indonesia, memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia, dan meningkatnya perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, kerjasama bilateral antara Indonesia dan China dalam pembangunan infrastruktur akan memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Amandemen Keempat.
_____. *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*. UU No. 4 Tahun 2000.

B. Buku

- Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
_____. *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar*. Bandung: Kemi Media, 2011.
Bakry, Umar Suyadi. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
Burhan, Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
Dam, Sjamsumar dan Riswandi. *Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
Djafar, Zainuddin. *Indonesia, ASEAN & Dinamika Asia Timur, Kajian Perspektif Asia Ekonomi-Politik*. Jakarta: Pustaka Jaya, 2008.
Holsti, K.J. *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis*, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga, 1988.
Juwana, Hikmahanto. *Hukum Internasional Dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Berkembang*. Jakarta: Yarsif Watampone, 2010.
Kartasasmita, Koesnadi. *Administrasi Internasional*. Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, 1997.
Krisna, Didi. *Kamus Politik Internasional*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993.
Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 2003.
Mauna, Boer. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, 2015.
Muhammad, Ashri. *Hukum Perjanjian Internasional*. Makassar: Arus Timur, 2012.
Pratomo, Eddy. *Hukum Perjanjian Internasional: Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi*. Bandung: Alumni, 2011.
Riduan, Muhammad. *Kebijakan Ekonomi Politik Cina Dalam Pembangunan di Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017.
Sidarto, Sulistijo dan Budi Santoso. *Proyek Infrastruktur dan Sengketa Konstruksi*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
Sinaga, Lidya Christin. *Enam Dekade Hubungan Diplomatik Indonesia - China dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Keamanan dan Ekonomi di Asia Tenggara*. Jakarta: LIPI Press, 2013.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
Sumardi, Juajir. *Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise*. Makassar: Arus Timur, 2012.
Suryadinata, Leo. *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto*. Jakarta: LP3ES, 1998.
Suryono, Agus. *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB Press, 2010.
Wibowo, I dan Syamsul Hadi. *Merangkul Cina: Hubungan Indonesia-Cina Pasca-Soeharto*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Yuanzhi, Kong. *Silang Budaya China Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 1999.

C. Lain-lain

Andika, Muhammad Tri. “Analisis Politik Luar Negeri Indonesia-China di Era Presiden Joko Widodo: Benturan Kepentingan Ekonomi dan Kedaulatan?”. *Indonesian Perspective*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2017.

Biro Riset BUMN (LM - FEB UI). “Model Pembiayaan Infrastruktur: Indonesia Dengan Negara Lain”. <https://lmfeui.com>. Diakses tanggal 10 Nopember 2020.

CNN Indonesia. “Relasi Indonesia-China di Era Jokowi: Mau tapi Malu”. <https://www.cnnindonesia.com>. Diakses tanggal 10 Oktober 2020.

Diaan - Yi Lin. “Menjawab Kebutuhan Infrastruktur melalui Kemitraan Pemerintah Swasta”. <http://www.mckinsey.com>. Diakses tanggal 10 Nopember 2020.

Dinisari, Mia Chitra. “Berikut Kerja sama Indonesia-China Selama 70 Tahun”. <https://kabar24.bisnis.com>. Diakses tanggal 10 Nopember 2020.

Hambani, Harfi. “Colaboration Of Cooperate Strategy Economic Tiongkok And Indonesia: Sebagai Power Plan Economic Country Indonesia”. *Jurnal. Universitas Mataram*, 2015.

Hambani, Harfi, Baiq Riyan Anggriani Putri, “Colaboration of Cooperate Strategy Economic Tiongkok and Indonesia: Sebagai Power Plan Economic Country Indonesia. <http://ukmprima.unram.ac.id>. Diakses tanggal 10 Nopember 2020.

Hamdani, Dani. “Membuka Tabir: China dalam Pusaran G30SPKI”. <https://www.gatra.com>. Diakses tanggal 10 Oktober 2020.

Harian Ekonomi Neraca. “Ajak Swasta Realisasikan Proyek PPP”. <http://www.neraca.co.id>. Diakses tanggal 10 Nopember 2020.

Harian Kompas. “Indonesia-Cina Sepakat Tingkatkan Kerjasama Dibidang Ekonomi”. <http://nasional.kompas.com>. Diakses tanggal 10 Nopember 2020.

Harian Kompas. “Setelah KA Cepat, Rini Ajak China Kerja Sama di Industri Aluminium”. <http://bisniskeuangan.kompas.com>. Diakses tanggal 10 November 2020.

Ilimie, M. Irfan. “China Tawarkan Proyek Infrastruktur di Indonesia di Tengah Pandemi”. <https://www.antaraneews.com>. Diakses tanggal 10 Nopember 2020.

Jefriando, Maikel. “Era Jokowi, Indonesia-Cina Makin Mesra”. <https://finance.detik.com>. Diakses tanggal 10 Oktober 2020.

Kantaarmadja, Mieke Komar. “Instrumen Hukum Nasional dalam Peratifikasian Perjanjian-perjanjian Internasional”. *Makalah dalam Lokakarya Hukum Perdata*, Jakarta, 1973.

Kementrian Keuangan. “Rekomendasi Kebijakan Untuk Infrastruktur”. <http://www.perpustakaan.depkeu.go.id>. Diakses tanggal 10 Nopember 2020.

Marbun,. Sardan. “Satu Dasawarsa Membangun untuk Kesejahteraan Rakyat”. <http://www.academia.edu>. Diakses tanggal 10 Desember 2020.

Pamungkas, Gunadi Siswo. “Pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar Kota Surabaya”, <http://wwwlib.ui.ac.id/file?file=digital/132995-T%2027821...HA.pdf>. Diakses tanggal 10 Desember 2020.

Prabowo, Dani. “Lagi, China Terlibat Proyek Infrastruktur Indonesia”. <https://properti.kompas.com>. Diakses tanggal 10 Oktober 2020.

- Putri, Erika Sefila. “Struktur Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Penunjang Pertumbuhan Ekonomi”. <https://www.researchgate.net>. Diakses tanggal 10 November 2020.
- Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. “Disaksikan Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping, RI-RRT Tandatangani 8 Kerjasama”. <http://setkab.go.id>. Diakses tanggal 10 Nopember 2020.
- Setiawan, Sigit. “Asean-China FTA: Dampaknya terhadap Ekspor Indonesia dan Cina”. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 6, No. 2 Desember 2012.
- Siregar, Reva Rivanda. “Konsep Bantuan Luar Negeri Cina ke Indonesia sebagai Kedok Investasi (Studi Kasus: Implikasi Pengiriman Tenaga Kerja Asing Cina)”. *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 5 Edisi 1 April 2016.
- Supriyatna, Iwan. “Kerjasama Bilateral Indonesia-China Penting Dipahami Masyarakat”. <https://www.suara.com>. Diakses tanggal 10 Oktober 2020.
- Tahir, A. Trimayasari. Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kerjasama Ekonomi ACFTA (Asean-China Free Trade Agreement) Dan Dampaknya Bagi Perekonomian di Indonesia. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017.
- Utami, Rini. “Hubungan Indonesia-Tiongkok: dari Soekarno hingga Jokowi”. <https://www.antaraneews.com>. Diakses tanggal 10 Oktober 2020.
- Waluyo, Andy lala. “BUMN Indonesia, China Resmikan Kerjasama Pembangunan Kereta Cepat”. <http://www.voaindonesia.com>. Diakses tanggal 10 November 2020.